



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BASTIAN DERAJAT PULUNGAN**
2. Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN UMUM**
3. NHK : **220070**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

2.606.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m2/144 m2 di DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 342.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/96 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 402.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/116 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 852.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m2/146 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
5. Tanah Seluas 119 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/90 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 159 m2/128 m2 di KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

297.500.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI EXPANDER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000



4. MOTOR, HONDA BEAT POP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
5.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	21.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	56.181.614
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.981.181.614
III. HUTANG	Rp.	16.600.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.964.581.614

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.